

PERAN GURU DI WILAYAH PESISIR DAN TERPENCIL

Abdul Waqif*)

e-mail : awaqifs@yahoo.co.id

Abstract: *Poverty of the people in the coastal and remote islands can occur due to complex causes, among others because of: (1) a wrong paradigm or view of life that is marked by fatalism and living surrender to the conditions of his life; (2) low experience and level of education; (3) limited ownership of assets; (4) rely solely on individual efforts in living their lives; (5) dependence on retainer snares; (6) isolation due to limited facilities, infrastructure, mobility and information; and helplessness. The impact of poverty on education causes high rates of dropout. A person can become poor because of the low level of education, and vice versa, someone chooses to drop out of school because of the lack of economic level he has. Teachers have a very strategic role in helping to overcome poverty, especially in coastal and remote islands, in addition to carrying out the task of educating and teaching in schools, the teacher also acts as a servant in the community, namely as a problem solver, facilitator, innovator, and partner friend.*

Keywords: *Poverty, Teachers, Education, Coastal and Remote Communities.*

Bangsa Indonesia dewasa ini masih terus berbenah membangun berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan, dan pendidikan serta berbagai aspek lainnya menuju kehidupan sosial masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945.

Meskipun demikian, sejak diproklamirkannya kemerdekaan Bangsa Indonesia pada Tanggal 17 Agustus 1945 hingga saat ini, Bangsa Indonesia masih saja menghadapi tantangan yang silih berganti, baik itu tantangan internal maupun tantangan yang bersifat eksternal. Sebagaimana halnya dengan bangsa-bangsa lain di dunia, salah satu tantangan terbesar dan menjadi momok menakutkan yakni tingginya angka kemiskinan.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2015 menggambarkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga kini masih didominasi oleh masyarakat perdesaan. Hal ini dapat dilihat dari proporsi jumlah penduduk miskin di perdesaan yang mencapai 17,89 juta jiwa atau 62,6%.

Data tersebut didukung dengan data yang dirilis oleh Kementerian Desa Tertinggal Tahun 2015, menyebutkan bahwa hasil dari nilai rata-rata IDM desa di Indonesia tahun 2015 adalah sebesar 0,566. Hasil ini diperoleh dengan rata-rata dari nilai IKL sebesar 0,6473, IKE sebesar 0,4564, dan IKS sebesar 0,5931. Hasil IDM tersebut memiliki makna bahwa status perdesaan Indonesia hingga kini, sebagian wilayah masih tergolong ke dalam status desa yang tertinggal. Bahkan bila dilihat dari sisi ekonomi (IKE),

tingkat ketahanan ekonomi perdesaan di Indonesia masih dalam status desa tertinggal.

Jika dilihat dari sisi proporsi, jumlah perdesaan di Indonesia yang tertinggal mencapai 47.045 desa atau sebesar 63,82%. Jumlah ini terdiri dari jumlah desa yang tertinggal mencapai 33.592 desa (45,57%) dan desa yang sangat tertinggal mencapai 13.453 desa (18,25%). Dengan kondisi perdesaan Indonesia yang masih didominasi status tertinggal tersebut, tidak mengherankan apabila penduduk miskin di perdesaan meningkat sebesar dari 2,99 % bila dibandingkan dengan tahun 2014 (Agustin Y. 2016).

Kemudian dari sumber lain disebutkan bahwa, berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2016 angka kemiskinan di Indonesia mencapai 28,01 juta atau sebesar 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. Meskipun angka tersebut, mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yakni mencapai 28,51 juta jiwa atau sebesar 11,22 persen dari total penduduk Indonesia per periode September, namun dinilai angka tersebut masih tergolong tinggi (Afrianto D. 2016).

Berdasar pada data di atas, diperoleh informasi bahwa kemiskinan di Indonesia banyak dialami oleh masyarakat yang berada di wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau. Tingginya angka kemiskinan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain karena keadaan ekonomi, kondisi wilayah atau keterisolasian, keterbatasan fasilitas, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Sebagaimana disebutkan

oleh berbagai sumber, salah satu sumber menyebutkan bahwa, kemiskinan terjadi karena: (1) rendahnya taraf pendidikan, (2) rendahnya derajat kesehatan, (3) terbatasnya lapangan kerja, dan (4) kondisi keterisolasian (Kartasasmita. 1996 : 240-241).

Mencermati pandangan tersebut, jika dikorelasikan dengan kondisi masyarakat saat ini, khususnya kondisi masyarakat di wilayah pesisir dan wilayah terpencil kepulauan, maka faktor-faktor tersebut menjadi bagian dari pokok permasalahan yang dihadapinya.

Berdasarkan pengalaman penulis bertugas di wilayah terpencil kepulauan selama kurun waktu 18 tahun ditemukan beberapa fakta autentik, bahwa masyarakat mengalami kemiskinan tidak hanya karena pengaruh letak geografis yang terpencil, tingkat perekonomian yang minim ataupun fasilitas sarana prasarana yang dimiliki terbatas. Namun permasalahan utamanya lebih pada tingkat pendidikan yang relatif rendah, sehingga pola pikir menjadi terbelakang, stagnan, dan sulit beradaptasi mengikuti perubahan dan perkembangan yang ada. Bahkan ada kecenderungan merusak sumber daya alam dan pola hidup instan. Masyarakat yang pada umumnya adalah orang tua siswa, rata-rata hanya berpendidikan SD, ada juga sebagian kecil yang tamat SMP dan SMA, bahkan masih terdapat yang buta aksara. Sehingga inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjalankan tugas sebagai guru/pendidik, selain mengajar/ mendidik para siswa tetapi juga sekaligus mengubah paradigma (pengetahuan,

sikap, dan keterampilan) masyarakat menuju tatanan hidup yang lebih maju.

Meskipun kualitas sumber daya manusianya tergolong rendah, namun tidak berarti pupus harapan untuk menjadi lebih baik dan tidak pula berarti minim potensi pada aspek lain untuk dikembangkan khususnya generasi muda dan peserta didik sebagai sumber daya manusia (SDM). Potensi kelautan pun masih menjadi aspek dominan untuk bisa dikembangkan, seperti potensi terumbu karang dan pasir putih untuk destinasi wisata, rumput laut, kerapu, lobster, kuda laut, dan beragam potensi laut lainnya, yang belum dikelola secara optimal. Meskipun diakui, bahwa pada spot-spot tertentu terumbu karang telah rusak dan biota-biota laut sebagian sudah punah. Namun dengan potensi yang ada, menjadi kekuatan atau motivasi untuk melakukan inovasi-inovasi pengembangan, seperti konservasi, budidaya, ataupun destinasi wisata.

Untuk bisa mengimplementasikan hal tersebut, maka posisi pendidikan menjadi penawaran yang tinggi. Peran guru sangat dibutuhkan. Sebab potensi sumber daya alam yang ada, selamanya tak terkembangkan dengan baik jika tidak didukung oleh sumber daya manusia yang unggul. Sumber daya manusia yang unggul akan lahir dari proses pendidikan dan pengalaman yang matang, dan proses pendidikan yang berkualitas akan terwujud jika dimotori oleh guru yang berjiwa profesionalis dan berkompotensi mumpuni dalam menyiapkan generasi penerus yang saat ini mengenyam pendidikan di bangku sekolah dan mampu bersosialisasi dengan masyarakat

untuk memanfaatkan dan melestarikan potensi sumber daya alam yang ada.

Bertolak dari kondisi riil masyarakat wilayah pesisir dan kepulauan serta keterlibatan guru dalam aktivitas keseharian masyarakat, maka penulis mencoba mengangkat topik makalah, dengan judul “Peran Guru Terhadap Pendidikan Masyarakat Pesisir dan Pulau dalam Mengatasi Kemiskinan”.

Sebab Kemiskinan di Wilayah Pesisir dan Pulau

Posisi geografis ataupun letak wilayah dan situasi kehidupan masyarakat Indonesia yang ada hingga saat ini banyak menggambarkan akan kondisi kemiskinan. Utamanya di wilayah-wilayah pedesaan, pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau terpencil.

Fakta yang ada menyiratkan bahwa semakin terpinggirkan dan terisolasi suatu wilayah dalam pembangunan ekonomi, maka sepertinya wilayah tersebut akan semakin terbelakang, semakin terbelakang maka semakin tertinggal, dan semakin tertinggal maka akan semakin sulit masyarakatnya untuk lepas dari mata rantai kemiskinan.

Asumsi tersebut didukung oleh data Bank Dunia dan BPS Tahun 2015 yang menggambar perbedaan angka kemiskinan di kota dan di desa, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut:

	2010	2011	2012	2013	2014
Kemiskinan Pedesaan (% penduduk yg hidup di bawah garis kemiskinan desa)	16.6	15.7	14.3	14.4	13.8
	2010	2011	2012	2013	2014

Kemiskinan Kota (% penduduk yg tinggal di bawah garis kemiskinan kota)	9.9	9.2	8.4	8.5	8.2
--	-----	-----	-----	-----	-----

Sumber: Bank Dunia dan Badan Pusat Statistik (<http://www.indonesia-investments.com>).

Berdasarkan data tersebut diperoleh gambaran bahwa angka kemiskinan masyarakat kota dan desa di Indonesia rentang kesenjangan (*gap analysis*) masih tinggi, meskipun dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Beberapa sebab kesenjangan tersebut dapat dilihat ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana seperti sarana transportasi, telekomunikasi dan informasi, kesehatan, dan pendidikan. Selain itu, sebab kesenjangan dapat dilihat dari aspek kemudahan aksesibilitas mendapatkan layanan. Masyarakat di wilayah pedesaan, pedalaman, pesisir, dan pulau-pulau terpencil mengalami kesulitan mengakses layanan-layanan dasar berbeda dengan masyarakat perkotaan.

Mencermati kondisi tersebut, maka Presiden Jokowi sangat menekankan bahwa pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif dan gigih. Selain itu paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif (<http://tribunindonesia.com>.)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Propenas) menyebutkan berdasarkan penyebab kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang disebabkan: (1) sikap dan kebiasaan hidup masyarakat yang tidak produktif; (2) keterbatasan sumber daya dan keterisolasian; dan (3) **rendahnya taraf pendidikan** dan derajat kesehatan, terbatasnya lapangan kerja, dan ketidakberdayaan masyarakat, dan kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang disebabkan (1) perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis ekonomi; (2) perubahan yang bersifat musiman seperti kasus kemiskinan nelayan dan pertanian tanaman pangan; dan (3) bencana alam atau dampak dari suatu kebijakan.

Selain sebab-sebab tersebut, Manurung (1993) menyebutkan berbagai sebab terjadinya kemiskinan. Menurutnya kemiskinan masyarakat terjadi karena faktor manusia dan faktor non manusia. Pertama, kemiskinan karena faktor manusia disebabkan karena: (1) sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah, Malas berpikir dan bekerja, (2) kurang keterampilan, (3) pola hidup konsumtif, (4) sikap apatis/egois/pesimis, (5) rendah diri, (6) adanya gap antara kaya dan miskin, (7) belenggu adat dan kebiasaan, (8) adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya), (9) adanya kerusakan lingkungan hidup, (10) **pendidikan rendah**, (11) populasi penduduk yang tinggi, (12) pemborosan dan kurang menghargai waktu, (13) kurang motivasi mengembangkan prestasi, (14) kurang kerjasama, (15) pengangguran dan sempitnya

lapangan kerja, (16) kesadaran politik dan hukum, (17) tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat, dan (18) kurangnya tenaga terampil bertumpu ke kota. Kedua, kemiskinan karena faktor non manusia, disebabkan karena: (1) faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit, (2) keterampilan atau keterisolasi desa, (3) sarana pehubungan tidak ada, (4) kurang Fasilitas umum, (5) langkanya modal, (6) tidak stabilnya harga hasil bumi, (7) industrialisasi sangat minim, (8) belum terjagkau media informasi, (9) kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa, dan (10) kepemilikan tanah kurang pemerataan (Manurung, dalam Bulletin YDS, 1993:4). Demikian pula Kartasasmita menyebutkan, bahwa kemiskinan terjadi karena: (1) **rendahnya taraf pendidikan**, (2) rendahnya derajat kesehatan, (3) terbatasnya lapangan kerja, dan (4) kondisi keterisolasian (Kartasasmita. 1996: 240-241).

Kemudian di pihak lain, berdasarkan pengalaman dan pengamatan penulis bertugas di wilayah kepulauan selama 18 tahun, kemiskinan masyarakat khususnya para nelayan disebabkan karena beberapa hal, yaitu: (1) paradigma atau pandangan hidup yang keliru yang ditandai sikap fatalisme dan hidup pasrah dengan keadaan hidupnya. Menurutnya bahwa kondisi hidup yang dialaminya sepenuhnya sudah menjadi takdir Tuhan terlebih keadaan tersebut juga dialami orang tuanya selama bertahun-tahun. Paradigma tersebut terjadi karena sebab **pengalaman dan tingkat pendidikan yang rendah**, sehingga minim pengetahuan, sikap, dan keterampilan; (2) keterbatasan kepemilikan aset.

Sebagai nelayan sebagian besar hanya memiliki perahu kecil dengan alat tangkap sederhana, menyebabkan hasil yang diperolehnya sangat terbatas; (3) hanya mengandalkan usaha individu dalam melakoni kehidupannya, khususnya dalam usaha penangkapan ikan di laut, walaupun ada kerja sama atau kongsi usaha, mereka hanya sebagai buruh atau anak buah (sawi) dari pengusaha/ pemodal (punggawa); (4) jerat ketergantungan pada punggawa. Sebagian besar usaha nelayan dimodali oleh punggawa, dalam posisi ini nelayan hanya sebagai sawi. Sehingga dalam kondisi ini sangat rentan dengan praktik rentener (kredit) dan ini terus terjadi, seakan menjadi sebuah siklus mata rantai berkepanjangan; (5) keterisolasian akibat fasilitas, sarana prasarana, mobilitas dan informasi yang terbatas. Pada musim tertentu, keadaan pulau sangat terisolasi akibat gelombang laut, untuk melautpun tidak bisa, hubungan antar pulau dan daratan terputus. Akibatnya ketersediaan kebutuhan pokok sangat terbatas, termasuk pelayanan kesehatan; (6) ketidakberdayaan sebagai akibat dari faktor-faktor yang tersebut pada poin-poin di atas (1 sampai 5).

Berdasarkan beberapa pandangan di atas, maka tergambar jelas bahwa aspek pendidikan merupakan isu sentral dan menjadi faktor utama yang berpengaruh terhadap terjadinya kemiskinan. Area inilah yang menjadi bidang garapan para guru dalam membantu mengatasi kemiskinan.

Mencermati hal tersebut, maka dapat diasumsikan bahwa untuk mengatasi kemiskinan yang terjadi di lingkungan masyarakat khususnya wilayah-wilayah pesisir dan pulau terpencil, salah satu strategi dan

pendekatan yang dapat dilakukan yakni memberdayakan dan meningkatkan peran guru dalam memberdayakan masyarakat.

Dampak Kemiskinan Terhadap Pendidikan Masyarakat

Masalah kemiskinan merupakan problematika sosial yang bersifat kompleks. Karena kompleksitasnya seperti banyaknya sebab dan akibat yang ditimbulkan, maka pun memunculkan beragam defenisi, terlebih jika ditinjau dari berbagai aspek atau dimensi seperti ekonomi, sosial, dan politik. Namun untuk kepentingan penulisan makalah ini, perspektifnya ditinjau dari segi pendidikan.

Kemiskinan pada dasarnya erat kaitannya dengan sumber daya manusia. Dari berbagai kajian literatur disebutkan bahwa kemiskinan terjadi karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kuncoro M (2003:131) menyebutkan, bahwa kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

Masalah kemiskinan yang dialami masyarakat di Indonesia dominan ditandai dengan sulitnya memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, seperti sandang, pangan dan papan. Sehingga pada satu keluarga tak jarang kita temui melibatkan seluruh anggota keluarganya termasuk anak-anaknya yang masih usia sekolah

untuk turut serta membantu mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan primer sehari-hari. Pola dan sistimnya pun beragam, ada yang menjadi pemulung, peminta-minta, pengamen, berjualan, buruh, kurir dan sebagainya. Dan untuk keluarga miskin di wilayah pesisir dan pulau khususnya masyarakat nelayan melibatkan anak-anaknya untuk turut serta melaut.

Situasi seperti itu tentunya sangat berdampak pada proses pendidikan anak juga pada perkembangan fisik, mental, dan intelektual mereka. Anak-anak yang banyak terlibat dalam mencari nafkah cenderung malas ke sekolah bahkan memilih untuk tidak lagi bersekolah atau putus sekolah. Hal tersebut disebabkan karena alasan takut meninggalkan orang tuanya bekerja sendiri. Ada juga beralasan sudah jauh ketinggalan pelajaran atau malu sama teman sekelasnya karena jarang ke sekolah. Bahkan ada yang tak ingin bersekolah karena sudah nyaman merasakan mendapatkan uang sendiri.

Berdasarkan keterangan Mendiknas Mohammad Nuh (2011), bahwa terdapat 1,08 juta siswa atau 2,05 persen yang putus sekolah dan 3,03 juta lulusan sekolah dasar sampai sekolah menengah tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi karena alasan ekonomi (Siagian N. 2011).

Tingginya angka tersebut menyiratkan bahwa tingkat perekonomian berpengaruh kuat atas minat seseorang melanjutkan sekolah. Seseorang bisa menjadi miskin karena rendahnya tingkat pendidikan, begitupun sebaliknya seseorang memilih putus sekolah karena minimnya tingkat ekonomi yang dimilikinya.

Peran Guru dalam Membantu Mengatasi Kemiskinan

Keberadaan guru bagi suatu bangsa sangat urgen. Guru merupakan komponen strategis yang memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan gerak maju kehidupan bangsa. Maju mundurnya suatu bangsa tidak terlepas dari peran serta guru. Guru membentuk mental generasi. Guru mewujudkan sumber daya manusia handal. Guru memiliki keterikatan batin dengan peserta didiknya. Dalam menjalankan peran pendidikan, guru memiliki tugas tertentu. Selain melaksanakan tugas profesional, guru juga melaksanakan tugas sosial, dan tugas personal.

Tugas profesional guru telah digariskan dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 dan Undang Undang No. 14 Tahun 2005, bahwa tugas pokok guru, adalah; a) guru sebagai pendidik. b) guru sebagai pengajar. c) guru sebagai pembimbing. d) guru sebagai pengarah. e) guru sebagai pelatih. f) guru sebagai penilai dan pengevaluasi dari peserta didik.

Sebagai orang yang menjalankan tugas-tugas profesional di sekolah, seorang guru harus mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Dan tentunya menghadirkan proses pembelajaran yang mendidik dan membelajarkan peserta didik. Suatu proses yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan, namun lebih kepada terwujudnya suatu proses pendidikan yang mampu membentuk sikap dan keterampilan peserta didik atau terpenuhinya domain kognitif, afektif dan psikomotorik. Sehingga pada akhirnya terwujud peserta didik yang berkarakter, peserta didik yang

memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang terwujud dalam perilakunya yang taat nilai dan norma (agama dan budaya). Serta terwujudnya guru pembelajar, sebagaimana yang dicita-citakan mendiknas saat ini.

Selain menjalankan tugas profesi di sekolah sebagaimana yang disebutkan diatas, hal yang harus disadari adalah keberadaan guru di tengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan tugas pokoknya, seorang guru tentunya berintraksi dengan kehidupan sosial masyarakat. Untuk bisa diterima dengan baik dan bisa memberi pengaruh, seorang guru dituntut memiliki kompetensi sosial yang tinggi. Dalam pandangan masyarakat, khususnya di pesisir dan pulau posisi seorang guru masih sangat dihormati. Baginya disematkan gelar kehormatan "Tuan Guru".

Guru merupakan sosok yang sangat berwibawa yang sering kali menjadi panutan bagi masyarakat. Guru merupakan seorang *Mu'allim* (memiliki ilmu dan mengajarkan ilmunya). Guru juga disebut sebagai *teacher a person whose occupation is teaching others*, yaitu seseorang yang pekerjaannya mengajar orang lain (Muhibbin Syah. 2003; 222).

Masyarakat menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh pengetahuan. Ini berarti bahwa guru memiliki kewajiban untuk mencerdaskan masyarakat dan bangsa menuju pembentukan manusia seutuhnya. Karena itu Bung Karno (dalam Sahertian, 1994) menyebut pentingnya guru dalam masa pembangunan adalah sebagai

“pengabdian masyarakat”. Dalam posisinya sebagai pengabdian masyarakat, maka dalam interaksinya khususnya dalam masyarakat pesisir dan pulau terpencil, seorang guru hendaknya berperan sebagai *problem solver*, fasilitator, inovator, dan sahabat mitra.

Peran Guru di Wilayah Terpencil

Kemiskinan merupakan salah satu isu penting dari kondisi sosial yang terjadi di lingkungan kita dan kondisi itu bisa dialami oleh siapa saja, tak menutup kemungkinan ada kerabat atau keluarga kita yang mengalaminya. Jika demikian adanya, maka tentunya kondisi tersebut menjadi keprihatinan bersama untuk bisa membantu mengatasi persoalan yang dihadapinya. Pemerintah telah banyak berupaya dalam mengatasi persoalan kemiskinan, telah banyak program dan anggaran yang direalisasikan untuk mengatasinya, namun hingga dewasa ini jerat kemiskinan belum bisa lepas dari kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan upaya pengentasan kemiskinan, pemerintah bersama seluruh stakeholder harus melakukan gerakan revolusi mental dan gerakan turun tangan bersama, dengan melibatkan seluruh potensi sumber daya manusia termasuk mengoptimalkan peran guru sebagai garda terdepan dan ujung tombak pembangunan di daerah-daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), sebagaimana halnya di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil.

Peran guru di daerah pesisir dan pulau-pulau terpencil, selain melaksanakan tugas profesional sebagai pendidik dan pengajar di sekolah dalam membentuk karakter

peserta didik, peran serta guru dalam pembangunan masyarakat pun harus didorong dan ditingkatkan, dengan cara mengoptimalkan tugas-tugas sosialnya sebagai *problem solver*, fasilitator, inovator, dan sahabat mitra.

Peran guru sebagai *problem solver*, yakni membantu masyarakat mengenal dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya, serta membantu mengenal potensi sumber daya alam (SDA) yang ada di lingkungan sekitarnya untuk bisa dikelola secara bijaksana dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya. Dalam posisi ini, masalah yang pertama yang harus diubah adalah aradigma atau pandangan hidup yang keliru yang ditandai sikap fatalisme dan hidup pasrah dengan keadaan hidupnya. Yakni dengan jalan memompa semangat usaha kerja keras dan kerja cerdas masyarakat melalui pendekatan agama dan budaya. Melalui pendekatan agama, hendaknya berangkat dari solusi yang ditawarkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ra'd Ayat 11, bahwa “*sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubah apa apa yang pada diri mereka*” . Kemudian melalui pendekatan budaya, bertolak dari “paseng to riolo” yang menyebutkan ersop tEmGiGi n tinulu mlomo nletai pmes edwt (*resopa temangingi na tinulu malomo naletai pammase dewata*), artinya hanya dengan usaha dan ketekunan rahmat Tuhan akan mendatangangi.

Peran guru sebagai fasilitator, yakni membantu masyarakat menghubungi otoritas untuk mendapatkan bantuan, baik modal

usaha maupun peralatan. Peran guru sebagai inovator, yakni membantu masyarakat membentuk kelompok-kelompok usaha produktif, sebagai cikal bakal terbentuknya koperasi dan atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang nantinya diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraannya secara berkesinambungan.

Peran guru sebagai sahabat mitra, yakni memosisikan diri sebagai partner ataupun mitra dan bukan sebagai punggawa yang menjadikan sawi sebagai “sapi perahan”, sehingga terbangun usaha bersama dengan jiwa dan semangat kegotongroyongan.

SIMPULAN

Bahwa kemiskinan masyarakat khususnya di wilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau terpencil terjadi karena sebab-sebab yang kompleks. Kemiskinan bisa terjadi karena sebab internal manusia dan non manusia. Kemiskinannya terjadi karena sebab: (1) paradigma atau pandangan hidup yang keliru yang ditandai sikap fatalisme dan hidup pasrah dengan keadaan hidupnya; (2) rendahnya pengalaman dan tingkat pendidikan; (3) keterbatasan kepemilikan aset; (4) hanya mengandalkan usaha individu dalam melakoni kehidupannya; (5) jerat ketergantungan pada punggawa; (6) keterisolasian akibat fasilitas, sarana prasarana, mobilitas dan informasi yang terbatas; dan ketidakberdayaan.

Dampak kemiskinan terhadap pendidikan menyebabkan tingginya angka putus sekolah. Tingginya angka tersebut menyiratkan bahwa tingkat perekonomian berpengaruh kuat atas minat seseorang melanjutkan sekolah. Seseorang bisa

menjadi miskin karena rendahnya tingkat pendidikan, begitupun sebaliknya seseorang memilih putus sekolah karena minimnya tingkat ekonomi yang dimilikinya.

Peran guru dalam membantu mengatasi kemiskinan utamanya bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil, yakni selain melaksanakan tugas pokok mendidik dan mengajar di sekolah, guru juga berperan sebagai pengabdian di masyarakat, yakni berperan sebagai *problem solver*, fasilitator, inovator, dan sahabat mitra.

DAFTAR PUSTAKA

- Afianto D. 2016. Alasan Angka Kemiskinan Turun di Awal 2016. (Online). (<http://economy.okezone.com/alasan-angka-kemiskinan-turun-di-awal-2016>, diakses tanggal 19 Juli 2016).
- Agustin Y. 2016. Pembangunan dan Kemiskinan di Pedesaan Indonesia. (Online). (<https://hariansemarang.com>, diakses 19 Juli 2016).
- Indonesia Investment. 2016. Kemiskinan Indonesia. (Online). (<http://www.indonesia-investments.com>/diakses tanggal 19 Juli 2016).
- Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep Pembangunan yang Berakar pada Masyarakat*. Bandung. ITB.
- Kuncoro M. 2003. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan Kebijakan, Edisi Ketiga*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

- Muhibbin Syah. 2008. *Psikologi Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sahertian.1994.Profil Pendidik Profesional. Yogyakarta: Andi Offset.
- Siagian N. 2011. Tiga Juta Siswa Tak Sekolah karena Miskin. (*Online*). (<https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/08/01>, diakses tanggal 19 Juli 2016).
- _____.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).
- _____.2003. Undang–Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003.
- _____.2004. Undang Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Tribun Indonesia. 2015. Janji Ekonomi Jokowi. (*Online*). (<http://tribunindonesia.com/read-13948-janji-ekonomi-jokowi.html>, diakses tgl 19 Juli 2016).